

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34. <http://ejournal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/249/160>
- Amry, F. al. (2021). *Fungsi Anggaran Dprd Dalam Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19*. Universitas Hasanuddin.
- DDTCNews. (2021). *Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Sri-Mulyani-Lakukan-4-Kali-Refocusing-Anggaran-Di-2021-Ini-Detailnya-34959>.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Elviani, R., Anwar, C., & Sitorus, R. J. (2021). Gambaran Usia pada Kejadian Covid-19. *JAMBI MEDICAL JOURNAL" Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan"*, 9(2), 204–209.
- Fitri, N., & Putri, S. (2019). Effect of Capital Expenditure and Personnel Expenditure on Regional Economic Growth: Empirical evidence from Western Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.35870/emt.v3i1.94>
- Fitria, N. J. L. (2020). Penerapan Work From Home dan Work From Office dengan Absensi Online sebagai Implikasi E-Government di Masa New Normal. *Civil Service*, 14(1), 69–83.
- Gulo, A. K., Zamzami, & Bhakti, A. (2017). Dampak Alokasi Belanja Langsung Terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 57–66.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kemenkeu. (2020). *Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>.
- Kementerian Keuangan. (n.d.-a). *Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan*. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/profil/mottomaklumatjanji.html>.
- Kementerian Keuangan. (n.d.-b). *Visi Misi KPPN Pematang Siantar*. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/profil/visi-misi.html>.
- KPPN Pematang Siantar. (2019). *Laporan Keuangan UAKPA Tahunan 2019*.
- KPPN Pematang Siantar. (2020). *Laporan Keuangan UAKPA Tahunan 2020*.
- KPPN Pematang Siantar. (2021). *Laporan Keuangan UAKPA Tahunan 2021 (Unaudited)*.
- Mangkoesobroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkoesobroto, G. (2001). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Mardhatillah, A., & Santoso, A. S. (2019). Implementasi Work Life Balance dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAM)*, 5(1), 41–44.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyawan, W., & Alia, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(2), 59–67.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan* (3rd ed., Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12.
- Nasution, Y. (2018). *Analisis Pengaruh Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup Di Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nourmanita, N. A. (2016). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 31–48.
- Orisu, L. M. (2014). Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 1990-2012. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, 8(1).
- Parahita, Y. (2014). *Penerapan Anggaran Partisipatif Pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi Pada Tiga Universitas Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Parwanto, M. L. E. (2021). Virus Corona (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19 kini telah bermutasi. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), 47–49.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawajaya Malang.
- Putra, A. F., & Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1–10.
- Putra, Y. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Anggaran Aspek Implementasi pada Satuan Kerja Lingkup BPKP RI: Analisis Perbandingan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara*, 3(2), 92–112.
- Putri, L. Y. (2017). *Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Pada Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Riyadi, S. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Rudianto. (2009). *Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Rusdiana. (2022). *Manajemen Kewirausahaan Kontemporer*. Bandung: Arsad Press.
- Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2020). Fungsi Anggaran sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2).

- Sitorus, A. S. T. (2020). *New Normal di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/new-normal-di-tengah-pandemi-covid-19.html>.
- Syahrl, Tressyalina, & Zuve, F. O. (2017). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pembelajaran BAHASA INDONESIA*. Padang: SUKABINA Press.
- Syaiful. (2006). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfirman, M. (2002). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Periode 1973-1997. In *Transformatif* (Vol. 2, Issue 2). Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran*
- Depdagri. 1997. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.